



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CAHYA ADHI WICAKSANA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 922404

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.888.916.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 251 m2/251 m2 di KAB / KOTA PATI, Rp. 415.000.000
3. Tanah Seluas 1540 m2 di KAB / KOTA KUDUS, Rp. 98.560.000
4. Tanah Seluas 1659 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 135.628.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/54 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 2365 m2 di KAB / KOTA REMBANG, Rp. 236.500.000
7. Tanah Seluas 954 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 78.228.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **241.700.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SPM Tahun 2003, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.700.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	92.231.388
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.563.855
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.283.411.243
III. HUTANG	Rp.	4.518.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.278.893.243

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.